

## WEBINAR UNDP-BKF

# *BKF Transformasi Jaminan Perlindungan Sosial di Indonesia.*

Kata Pengantar oleh Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet

Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian.

Selamat datang di webinar tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Tengah pandemi COVID-19 ini, webinar yang diselenggarakan bersama oleh UNDP dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Secara khusus, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ubaidi Soheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN); Balasz Horvath, Penasihat Senior UNDP Kantor Regional Asia dan Pasifik; Ibu Vivi Yulaswati, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Ibu Athia Yumna, Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan Lembaga Penelitian SMERU; dan Bapak Rus'an Nasrudin, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Perlindungan sosial adalah konsep yang populer di Indonesia, dan di sebagian besar negara di dunia. Semua pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah dan semua warga sadar mengenai konsep Perlindungan Sosial. Ada berbagai bentuk Perlindungan Sosial, dengan berbagai skema di setiap negara.

Perlindungan sosial juga dianggap sebagai bagian dari hubungan antara negara dan warga negara. Alokasi untuk perlindungan sosial umum dianggap sebagai bagian dari anggaran nasional.

Namun, ada suatu masa, di awal abad ke-20, ketika segalanya sangat berbeda.

Perlindungan sosial bukan hanya tidak ada tetapi hampir tidak dianggap sebagai prospek yang memungkinkan. Pekerja dan warga negara hanya bisa bermimpi untuk mendapat manfaat perlindungan sosial. Pemerintah tidak mau mengalokasikan dana hanya untuk melindungi warga negara. Dan banyak bank dengan lantang mengklaim bahwa ini bukanlah penggunaan uang yang bijaksana, bahwa ini tidak akan baik untuk pertumbuhan ekonomi dan tidak akan berhasil.

Namun, seiring berjalannya waktu, mentalitas berubah, dan beberapa pemimpin politik dan ekonomi memiliki keberanian untuk menentang pandangan tradisional dan membuat keputusan yang berani. Dan perlindungan sosial diciptakan, diterima, dan diterapkan. Dan ini adalah titik balik dalam sejarah sosial-ekonomi karena telah mengubah kehidupan jutaan orang, meskipun banyak yang tetap, dan masih tertinggal, dan tanpa hak perlindungan sosial.

## WEBINAR UNDP-BKF

# *BKF Transformasi Jaminan Perlindungan Sosial di Indonesia.*

Kata Pengantar oleh Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet

Saat ini pada awal abad ke-21, kita mungkin berada dalam situasi serupa, di mana mungkin akan ada titik balik lain dalam sejarah sosial-ekonomi jika para pemimpin negara dan pejabat pemerintah berani mengambil keputusan yang akan mengubah kehidupan warga negara, semua warga negara tanpa kecuali.

Krisis COVID-19 menegaskan kenyataan yang telah diakui banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan sosial seperti yang kita kenal sekarang tidaklah cukup. Penargetan memiliki banyak kekurangan, kebocoran dan banyak warga negara dibiarkan tanpa perlindungan pada saat mereka sangat membutuhkannya, seperti saat krisis ekonomi atau kesehatan melanda mereka.

UNDP, sebagai sistem organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada pembangunan manusia dan ide-ide progresif, selama beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial seperti yang kita kenal sekarang tidak bekerja dengan baik dan tidak cukup. UNDP telah menyerukan untuk memikirkan tentang perlindungan sosial dengan cara baru yang menarik pembelajaran dari COVID-19 dan mempersiapkan krisis berikutnya yang akan datang, di mana tanggung jawab pemerintah adalah memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua warga negara. Sebentar lagi, Ekonom Senior UNDP kami, Balazs Hovarth, akan mempresentasikan analisis yang telah dibuat UNDP untuk kawasan Asia-Pasifik. Kantor UNDP Indonesia juga telah menerjemahkan analisis tersebut ke dalam Bahasa Indonesia, dan saya mengundang bapak ibu sekalian untuk membacanya karena analisis ini menunjukkan mengapa perlindungan sosial tidak cukup pada periode ini, dan mengapa tidak hanya perlu disesuaikan dengan perubahan kecil tetapi juga ditransformasikan dengan cara berpikir yang baru.

Sebagai bagian dari analisis kebutuhan perlindungan sosial di dunia saat ini dan masa depan, UNDP juga telah mengadvokasi dengan alasan ekonomi yang kuat untuk perlindungan sosial yang menyeluruh (universal coverage) dalam bentuk skema sementara, atau jaminan penghasilan dasar (Universal Basic Income) permanen yang lebih ambisius, yang telah diterapkan di beberapa negara. UNDP bersama BKF juga telah melakukan studi tentang apa arti UBI bagi Indonesia, saya sarankan bapak ibu membaca hasil studi tersebut. Seperti di awal abad yang lalu, berbagai kalangan mengatakan bahwa universal coverage tidak layak secara ekonomi atau diinginkan secara sosial, dan banyak yang masih lebih memilih untuk tetap menggunakan sistem yang telah ada, seperti banyak orang 100 tahun lalu menganggap perlindungan sosial bukanlah ide yang baik.

## WEBINAR UNDP-BKF

# *BKF Transformasi Jaminan Perlindungan Sosial di Indonesia.*

Kata Pengantar oleh Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet

Tetapi dengan pandemi COVID-19, semakin banyak pejabat senior di bidang politik, ekonomi, dan keuangan mulai berpikir secara berbeda, untuk merangkul visi sistem perlindungan sosial yang berbeda dan suatu masyarakat yang berbeda. Seperti yang akan dijelaskan oleh Balazs, ketersediaan sumber daya keuangan bisa dijadikan alasan, tetapi pada kenyataannya, hal tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan universal coverage, dan terdapat alasan sosial dan ekonomi yang kuat untuk berpindah ke model yang sepenuhnya baru.

Dalam konteks visi masa depan yang berbeda, maka diskusi kita bukan tentang bisnis dan bukan tentang normal baru, tetapi tentang kebutuhan dan kemungkinan nyata untuk mengubah perlindungan sosial untuk memberi manfaat bagi semua warga negara, dan untuk memastikan tidak seorangpun tertinggal.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saya akan meninggalkan Indonesia di penghujung minggu ini, menyelesaikan penugasan saya selama 5 tahun di negara yang indah ini. Saya harap Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi dan melaksanakan transformasi perlindungan sosial secara menyeluruh dan saya ucapkan semoga sukses untuk masa depan yang lebih aman dan lebih baik.